

# **PERTUMBUHAN KOTA TASIKMALAYA (1820-1942); DARI KOTA DISTRIK MENJADI KOTA KABUPATEN \***

Oleh: Miftahul Falah\*\*

## **Abstrak**

*The government of Tasikmalaya city has just established in 2002 as blossoming out from Tasikmalaya Regency. It is along with was born some problems about the history which is needed to be reconsidered. **First**, is it a name for Tasikmalaya related with the eruption of Galunggung in 1822? **Second**, is the history of Tasikmalaya City is identic with the history of Sukapura? and **Third**, is the Tasikmalaya city a changing of name from Tawang District?*

*To get the answers about that problems, it is done the historical research which is used the historical method. This method consist of four stages: heuristic, critic, interpretation, and historiography. After processing to collect the sources which is done (heuristic), is continued with a critic that sources, it has a purpose to get the authentic and credible sources. The fact of history which is got from that sources are given interpretation (either analysis or sintesis ), so it is got the description of the logic and chronologis old era. To produce the descriptive-analytical historiography, the theory of social change and the concept of city.*

*The result of research shows the name of Tasikmalaya is seemingly not related with the eruption of Galunggung in 1822 because the name of Tasikmalaya has been used at least 1820. The history of Tasikmalaya is not identic with Sukapura history because Tasikmalaya City has just become a part of this regency since 1901. Before that year, Tasikmalaya City is a part of the Parakanmuncang and Sumedang Regency. Tasikmalaya city is a changing of name from Cicariang District which has named Distrikt Tassikmalaija op Tjitjariang in 1820. In 1830s the name of that district became the district Cicariang. The changing of social in politic field can be seen from a changing of statue of Tasikmalaya becomes of the city : district, afdeeling, regency and it has ever been residency.*

## **A. Pendahuluan**

Saat ini, kata “Tasikmalaya” digunakan untuk dua nama hierarki pemerintahan daerah. **Pertama**, Kabupaten Tasikmalaya yaitu daerah otonom<sup>1</sup> yang dipimpin oleh seorang bupati dengan luas wilayah sekitar 2.508,91 km<sup>2</sup>. Sebelum bernama Tasikmalaya, kabupaten ini bernama Sukapura yang didirikan oleh Sultan Agung dari Mataram pada 9 Muharam Tahun Alif, bersama-sama dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parakanmuncang (van der Chjis, 1880: 80-81).<sup>2</sup> **Kedua**, Kota Tasikmalaya yakni daerah otonom yang dipimpin oleh seorang wali kota dengan luas wilayah sekitar 171,56 km<sup>2</sup> yang dibentuk pada 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 serta diresmikan pada 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta (Marlina, 2007: 98). Sebelum menjadi daerah otonom, Kota Tasikmalaya berkedudukan sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Pada 3 November 1976, Kota Tasikmalaya dijadikan sebagai kota administratif (kotif) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1976 yang dijabarkan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1976 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1976 (Pemerintah Kotif Tasikmalaya, 1977: i).

Pemerintahan Kota Tasikmalaya memang masih begitu muda. Akan tetapi, keberadaan Kota Tasikmalaya sudah dikenal jauh sebelum pemerintahan kota tersebut dibentuk. Pada masa kolonial, Kota Tasikmalaya menunjukkan pertumbuhan yang dinamis seiring dengan perubahan fungsi kota dari sebuah kota distrik (*district*) menjadi kota keresidenan (*residentie*). Sudah barang tentu perubahan status tersebut didorong oleh berbagai faktor baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Sementara itu, dilihat dari aspek wilayah administrasi pemerintahan, wilayah Kota Tasikmalaya tidaklah identik dengan Kabupaten Sukapura. Di lain pihak, opini umum menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan hasil dinamis dari perkembangan Kabupaten Sukapura.

Pertumbuhan Kota Tasikmalaya penting untuk diteliti karena sampai sekarang kota tersebut menjadi barometer di wilayah Priangan Timur (Santoso [ed.], 2004: 337). Dalam tulisan ini, tidak semua aspek yang menjadi indikator pertumbuhan sebuah kota akan dikaji, tetapi dibatasi pada tiga permasalahan. **Pertama**, kapan nama Tasikmalaya mulai dipergunakan dalam administrasi pemerintahan kolonial? **Kedua**, apakah Distrik Tasikmalaya merupakan wujud perubahan dari Distrik Tawang? **Ketiga**, apakah pertumbuhan Kota Tasikmalaya terkait dengan perkembangan Kabupaten Sukapura?

## **B. Kerangka Pemikiran Teoretis**

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Kota Tasikmalaya adalah sebuah wilayah administratif pemerintahan yang meliputi kecamatan, yaitu: Cihideung, Tawang, Cipedes, Indihiang, Mangkubumi, Kawalu, Taman Sari, dan Cibeureum. Dikaitkan dengan ruang lingkup temporal penelitian ini, wilayah administratif pemerintahan tersebut relatif sama dengan sebuah wilayah setingkat distrik pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang bernama Distrik Tasikmalaya. Dengan demikian, rekonstruksi sejarah Kota Tasikmalaya akan meliputi wilayah administratif Distrik Tasikmalaya yang di dalamnya terdapat pusat pemerintahan (*hoofdplaats*) yang kemudian menjadi wilayah perkotaan (Kota Tasikmalaya).

Untuk menentukan apakah suatu masyarakat telah memasuki kehidupan perkotaan, akan dipergunakan konsep kota dari Kluckhohn. Ia mengatakan bahwa kota atau masyarakat kota ditandai oleh sekurang-kurangnya dua dari tiga ciri sebagai berikut: (1) memiliki penduduk lebih dari 5.000 jiwa; (2) mengenal tulisan; dan (3) terdapat pusat-pusat upacara yang bersifat monumental (dalam Rahardjo, 2007: 9). Kondisi awal yang menjadi syarat penting munculnya kota mencakup tiga faktor. **Pertama**, adanya basis ekologis yang baik dan men-

guntungkan. **Kedua**, teknologi yang maju baik di bidang pertanian maupun nonpertanian. **Ketiga**, organisasi sosial yang kompleks dan maju, khususnya di bidang ekonomi dan politik. Struktur politik sangat diperlukan untuk memperoleh surplus makanan dari petani untuk mendukung masyarakat kota (Sjoberg dalam Muhsin, 1994: 11-12).

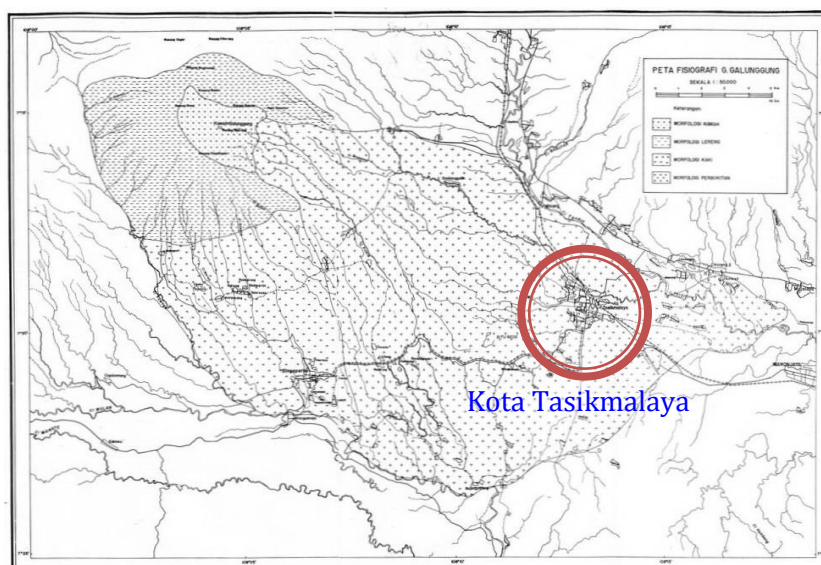
### C. Metode Penelitian

Dengan mengacu pada maksud dan tujuan penelitian, penelitian ini akan menggunakan metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif (Gottschalk, 1985: 32). Tahapan pertama dari metode sejarah adalah *heuristik* yakni proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Pada saat sumber sejarah telah terhimpun, proses metode sejarah berlanjut dengan melakukan kritik terhadap sumber tersebut baik kritik ekstern (untuk menentukan otentisitas sumber) maupun kritik intern (untuk menentukan kredibilitas sumber). Tahap ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi yakni proses menafsirkan berbagai fakta verbalistik, teknis, faktual, logis, maupun psikologis. Tahapan terakhir dari metode sejarah adalah historiografi yakni proses penulisan peristiwa masa lampau menjadi sebuah kisah sejarah yang kronologis dan imajinatif.

### D. Tasikmalaya: Tinjauan Etimologis

Secara etimologis, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Tasikmalaya. **Pertama**, Tasikmalaya merupakan nama yang berasal dari kata “tasik” dan “laya”. “Tasik” diartikan sebagai *keusik* (pasir) dan “laya” diambil dari kata *ngalayah* yang berarti hamparan. Dengan demikian, makna dari *keusik ngalayah* adalah hamparan pasir yang seolah-olah menutupi hampir seluruh wilayah yang sekarang bernama Kota Tasikmalaya. Hamparan pasir tersebut berasal Gunung Galunggung yang meletus pada tanggal 8 dan 12 Oktober 1822 (Ekadjati, 1975: 3; Marlina, 2007: 35; Permadi, 1975: 3). **Kedua**, ada yang berpendapat bahwa nama Tasikmalaya merupakan gabungan dari kata “tasik” dan “malaya”. Tasik berarti telaga, laut, atau air yang menggenangi, sedangkan “malaya” mengandung arti jajaran gunung-gunung (Muller dalam Marlina, 2007: 35). Dengan demikian, “tasikmalaya” mengandung makna “gunung-gunung yang berjejer dalam jumlah yang banyak” seperti yang terungkap dalam pemeo “*jajaran gunung-gunung teh lobana lir ibarat cai laut*” yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Tasikmalaya (Marlina, 2007: 35; Musch, 1917: 2002; Permadi, 1975: 3).

## Peta 1: Fisiografi Gunung Galunggung



Sumber: Bronto, S. 1983. "Geologi G. Galunggung" dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Tahunan X Ikatan Ahli Geologi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

Dalam peta 1, hamparan perbukitan di sebelah tenggara gunung tersebut (Kota Tasikmalaya) terlihat dengan jelas sehingga memperkuat pendapat bahwa nama Tasikmalaya memiliki hubungan dengan ribuan bukit (gunung). Oleh karena itu, ungkapan *jajaran gunung-gunung teh lobana lir ibarat cai laut* bukan hanya sekedar pemeo belaka, tetapi mengandung makna bahwa ribuan bukit kecil yang terdapat di wilayah Tasikmalaya merupakan ciri khas geografis daerah tersebut. Bukit-bukit kecil itu sudah ada sebelum tahun 1822 sehingga letusan Gunung Galunggung pada tahun tersebut menguatkan identitas wilayah tersebut sebagai "wilayah sepuluh ribu bukit" yang maknanya melekat pada nama Tasikmalaya (Furuya, 1978: 591-592; Zen, 1968: 62).

Kalau mengacu pada kedua pendapat tentang asal-usul nama Tasikmalaya yang memiliki kaitan erat dengan letusan Gunung Galunggung tahun 1822,<sup>3</sup> seharusnya nama tersebut baru dikenal setelah tahun 1822. Akan tetapi, nama Tasikmalaya telah digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, setidaknya sejak tahun 1820. Artinya, wilayah tersebut sudah bernama Tasikmalaya sebelum Gunung Galunggung meletus sehingga hamparan bukit yang melatarbelakangi penggunaan nama Tasikmalaya bukan berasal dari aktivitas Gunung Galunggung. Hal tersebut diperkuat oleh catatan geologi bahwa keberadaan ribuan bukit yang "menutupi" wilayah Tasikmalaya disebabkan oleh aktivitas Gunung Guntur di Garut yang diperkirakan meletus hebat sebelum tahun 1822. (Bronto, 1983: 8). Dengan demikian, menurut pendapat penulis, nama Tasikmalaya menunjukkan hubungan yang erat dengan aktivitas

dengan Gunung Guntur. Sementara itu, aktivitas Gunung Galunggung tahun 1822, memperkuat identitas atau ciri khas geografis wilayah Tasikmalaya.

**Foto 1: Gunung Galunggung sekitar Tahun 1880**



Sumber: [http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/KITLV01:122/&p=1&i=2&st=Tasikmalaja&sc=\(Tasikmalaja\)/&wst=Tasikmalaja](http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/KITLV01:122/&p=1&i=2&st=Tasikmalaja&sc=(Tasikmalaja)/&wst=Tasikmalaja). Diakses Tanggal 12 Mei 2008, Pukul 14.00 WIB.

### **E. Distrik Cicariang menjadi Distrik Tasikmalaya**

Berkaitan dengan eksistensi Tasikmalaya, ada yang berpendapat bahwa sebelum bernama Tasikmalaya, wilayah ini bernama Tawang. Secara geologis, daerah Tawang merupakan suatu hamparan tanah datar yang terletak di sebelah Tenggara Gunung Galunggung. Oleh karena itu, kadang-kadang daerah ini dinamai juga Tawang-Galunggung dan memiliki makna sebagai tempat *panyawangan anu plungplong ka ditu ka dieu* (Permadi, 1975: 3). Daerah Tawang-Galunggung bukan hanya berkedudukan sebagai sebuah perkampungan, tetapi juga sebagai sebuah distrik dalam lingkungan Kabupaten Sumedang. Distrik Tawang muncul ketika pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura dipindahkan dari Sukaraja ke Manonjaya tahun 1832. Dengan demikian, nama Tasikmalaya diduga baru muncul setelah tahun 1832 sebagai hasil perubahan nama dari Distrik Tawang atau Distrik Tawang-Galunggung (Marlina, 2007: 35; Sastrahadiprawira, 1953: 182).

Jika Distrik Tasikmalaya merupakan hasil perubahan nama dari Distrik Tawang, seharusnya distrik tersebut tercatat dalam administrasi pemerintahan kolonial. Akan tetapi, nama Distrik Tawang atau Tawang-Galunggung tidak terdapat dalam catatan arsip kolonial. Misalnya, dalam *Verlag Omtrent der Residentie Preanger-Regentschappen en Krawang*

1816, Raffles membagi wilayah Priangan menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh seorang wedana. Berdasarkan *verslag* tersebut, baik di Kabupaten Sumedang maupun di Kabupaten Sukapura tidak terdapat Distrik Tawang atau Distrik Tawang-Galunggung. Dalam *verslag* itu justru terdapat dua distrik yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya, yaitu Distrik Indihiang dan Distrik Cicariang (Hardjasaputra dalam Sjafrudin *et al.*, 1993: 263).

Sehubungan dengan itu, pendapat tersebut kiranya perlu ditinjau ulang karena kalau dikaitkan dengan statistik Pulau Jawa tahun 1820, Distrik Tasikmalaya menunjukkan kecenderungan sebagai perubahan nama dari Distrik Cicariang. Berdasarkan arsip itu diketahui bahwa salah satu distrik di wilayah Kabupaten Sumedang bernama *District Tasjikmalaija op Tjitjariang* dengan wilayah sepanjang 37 *pal*<sup>4</sup> dan pusat pemerintahannya di *Tjitjariang en Tasjikmalaija* (*Statistiek van Java*. 1820 Koleksi Arsip *Preanger-Regentschappen*. No. 28/9).

### Peta 2: Distrik (Kota) Tasikmalaya pada awal Abad XIX



Sumber: *District Tasikmalaja*. Koleksi Arsip Inventory of Cartographic Manuscript of the 17<sup>th</sup> to the 19<sup>th</sup> Century. No. 51. Jakarta: ANRI.

Pada akhir tahun 1830-an, nama *District Tasjikmalaija op Tjitjariang* menghilang sebagai nama wilayah pemerintahan. Pada tahun tersebut, muncul sebuah distrik bernama *District Tasjikmalaija* yang mencakup sekitar 79 desa (*Algemeen Instructie van Alle Inlandsche Hoofden en Beambten...1839*, Koleksi *Preanger-Regentschappen*, No. 29<sup>a</sup>/23). Pada pertengahan abad ke-19, distrik tersebut membawahi tujuh *onderdistrict*, yaitu Sambong, Si-

luman, Cibodas, Cisangkir, Cihideung, Pagaden, Mangkubumi, dan Cibeuti (van Carbee en Versteeg, 1853-1862; Veth, 1869: 906.). Mengapa Distrik Cicariang berubah nama menjadi Distrik Tasikmalaya? Perubahan tersebut lebih disebabkan oleh kebiasaan menyebut suatu wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan nama pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahan Distrik Cicariang dipindahkan dari Cicariang ke Tasikmalaya karena secara geografis wilayah tersebut lebih strategis. Tasikmalaya terletak pada jalur utama transportasi sedangkan Cicariang terletak agak ke pedalaman sehingga sangat menguntungkan bagi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

#### **F. Dari Kota Distrik menjadi Kota Kabupaten**

Dalam tulisannya berjudul *Sukapura (Tasikmalaya)*, Ietje Marlina (2000: 91-110) memandang Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari pertumbuhan Kabupaten Sukapura. Pendapat ini kemudian menjadi opini umum seperti yang terlihat dari beberapa tulisan mengenai Kota Tasikmalaya (Adeng, 2005; Roswandi, 2006). Sejatinya, pembahasan mengenai Kota Tasikmalaya harus dibedakan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Nama pemerintahan yang terakhir memang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Kabupaten Sukapura karena pada kenyataannya Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjelmaan dari Kabupaten Sukapura. Uraian mengenai Kota Tasikmalaya harus dilihat sebagai bagian dari perkembangan Kabupaten Sumedang.

Pada 1862, Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem *afdeeling* dalam struktur pemerintahan kabupaten. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuasaan bupati karena pemerintahan sehari-hari di wilayah *afdeeling* dijalankan oleh *hoofd van plaatselijke bestuur* (setingkat asisten residen) yang didampingi oleh *zelfstandige patih* atau patih *afdeeling* (Indonesia, 1953: 157-158; Lubis, *et al.*, 2003<sup>1</sup>: 340). Sistem *afdeeling* diberlakukan terhadap kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas. Salah satu kabupaten di *Residentie Preanger-Regentschappen* yang memiliki wilayah cukup luas adalah Kabupaten Sumedang sehingga berdasarkan sistem *afdeeling* tersebut, wilayahnya dipecah menjadi dua *afdeeling*. **Pertama**, *Afdeeling Baloebroer op Noord Soemedang* yang terdiri atas 6 distrik, 39 onder distrik, dan 209 desa. **Kedua**, *Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang* yang terdiri atas 5 distrik, 41 onder distrik, dan 254 desa. *Afdeeling* Baloebroer memiliki wilayah sepanjang 16,93 *Geographische Mijlen* atau 650 *pal* sedangkan *Afdeeling* Galoenggoeng memiliki panjang wilayah sekitar 15,85 *Geographische Mijlen* atau sekitar 383 *pal*<sup>5</sup> (*Statistiek der Preanger Regentschappen. 1863. Koleksi Arsip Preanger-Regentschappen, No. 30/5*). Pusat pemerintahan *Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang* terletak sekitar 7 *pal* dari kota

Manonjaya, ibu kota Kabupaten Sukapura, dan sekitar 55 *pal* dari kota Sumedang, ibu kota Kabupaten Sumedang<sup>6</sup> (Veth, 1869<sup>3</sup>: 906).

Pembentukan *Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang* membawa dampak bagi status Kota Tasikmalaya. Sejak *afdeeling* ini dibentuk, Kota Tasikmalaya tidak hanya berkedudukan sebagai *hoofdplaats der district* melainkan juga sebagai *hoofdplaats der afdeeling*. Dengan demikian, Kota Tasikmalaya tidak hanya menjadi tempat tinggal wedana melainkan juga menjadi tempat tinggal asisten residen sebagai *hoofd van plaatselijke bestuur* dan *zelfstandige patih* sebagai wakil bupati di daerahnya.

Perubahan wilayah pemerintahan kembali terjadi di Priangan tahun 1870, seiring dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus *Preangerstelsel*, kecuali untuk penanaman kopi karena komoditas perdagangan ini masih memberikan keuntungan besar untuk Kerajaan Belanda. Untuk dapat tetap menjalankan *preangerstelsel*, wilayah *Preanger-Regentschappen* terlebih dahulu harus direorganisasi. Selain ingin tetap mengeksploitasi tanaman kopi, Pemerintah Hindia Belanda ingin menerapkan sistem pemerintahan langsung (*direct rule*) di daerah Priangan. Keinginan tersebut disebabkan oleh besarnya kekuasaan bupati di Priangan meskipun kekuasaannya itu dijalankan atas nama Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Reorganisasi Priangan.<sup>7</sup>

Melalui reorganisasi tersebut, *Preanger-Regentschappen* dibagi menjadi sembilan *afdeeling*, yaitu *Afdeeling Sukabumi*, *Afdeeling Cianjur*, *Afdeeling/ Kabupaten Bandung*, *Afdeeling Cicalengka*, *Afdeeling/Kabupaten Limbangan*, *Afdeeling/Kabupaten Sumedang*, *Afdeeling Tasikmalaya*, *Afdeeling/Kabupaten Sukapura*, dan *Afdeeling Sukapura Kolot*. Dengan demikian, sebagian *afdeeling* bersatu dengan kabupaten yang dipimpin oleh bupati dan asisten residen. Sebagian lagi berdiri sendiri meskipun secara administratif merupakan bagian dari kabupaten tertentu (Natanagara, 1938: 114). *Afdeeling* Tasikmalaya meliputi wilayah seluas 98.768 hektar atau sekitar 15,86 *geographische mijlen* dengan batas wilayah Gunung Galunggung, Gunung Telagabodas, dan Gunung Karacak (sebelah barat); Pegunungan Cakrabuana (sebelah utara); Sungai Citanduy [*sic.*] (sebelah timur); dan Sungai Ciwulan dan Sungai Cikunir (sebelah selatan) (Stibbe, 1921: 284).



## Foto 2: Taman di Depan Kantor Asisten Tasikmalaya Tahun 1880



Keterangan: Kantor Asisten Residen Tasikmalaya terletak di Bekas Kompleks Kantor Bupati Tasikmalaya berseberangan dengan Masjid Agung Tasikmalaya, Kantor Patih, dan Penjara Tasikmalaya.

Sumber: Diakses dari [http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/KITLV01:866/&p=1&i=14&st=Tasikmalaja&sc=\(Tasikmalaja%20\\*\)/](http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/KITLV01:866/&p=1&i=14&st=Tasikmalaja&sc=(Tasikmalaja%20*)/), 28 September 2009, Pukul 1957 WIB.

Meskipun terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan, namun kedudukan Kota Tasikmalaya sebagai pusat pemerintahan *Afdeeling* Tasikmalaya tidak berubah. Kota Tasikmalaya tetap berstatus sebagai tempat patih dan asisten residen menjalankan kekuasaannya atas wilayah *Afdeeling* Tasikmalaya. Selain itu, *afdeeling* ini pun masih sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang (Klein 1931: 119; *RA voor NI*, 1871: 147; *Staatsblad van NI*, 1870. No. 121). Pada Maret 1891, Gubernur Jenderal Cornelis Pijnacker Hordijk menetapkan batas-batas Kota Tasikmalaya berdasarkan *Besluit van 17 Maret 1891 No. 8* sebagai berikut.

- Utara** : Titik di mana jalan raya dari Tasikmalaya ke Sumedang me-motong tegak lurus jalan yang membentang di sepanjang kampung Cipedas ke kampung Cigadog.
- Barat** : Dari titik potong itu menuju selatan, menyusuri jalan tersebut sepanjang kampung Cipedas dan Cihideung menuju kampung Cigadog sampai di mana jalan itu memotong jalan Nagarawangi tegak lurus pada pilar 3.
- Selatan** : Dari titik ini ke timur menyusuri jalan Nagarawangi sampai di mana titik ini bertemu pada pilar 2 di jalan raya dari Mangunreja ke Tasikmalaya.
- Tenggara** : Dari titik pilar 2 ini sebuah garis lurus ditarik ke titik di mana pada pilar 1 selokan Cihideung dan selokan Cimulu saling bertemu.
- Timur Laut** : Dari persimpangan pada pilar 1 ini menyusuri ke arah timur laut selokan Cimulu sampai ke ujung bendungan batu besar. Kemudian menyusuri sungai Cimulu sampai ke titik di mana jalan raya dari Tasikmalaya ke Sumedang ini memotong dan selanjutnya jalan raya sampai di mana mereka bertemu dengan jalan kampung dari Cigadog ke Cipedas.

**Peta 3: Pusat Kota Tasikmalaya, 1919-1922**



Sumber: *Tasikmalaja*. Koleksi Arsip Kartografi Indonesia 1913-1946. No. 744/Blad 49 n/24. Jakarta: ANRI.

Dengan keluarnya *besluit* tersebut, identitas Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang memiliki fungsi ideologis, administrasi, dan politik semakin menguat. Fungsi ideologis menjadi menguat karena Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan status dari kota distrik menjadi kota *afdeeling*. Fungsi administrasi secara efektif dapat dijalankan karena Kota Tasikmalaya berperan sebagai pusat informasi dan pengambilan keputusan, setidaknya bagi wilayah administrasi pemerintahan *Afdeeling* Tasikmalaya. Fungsi politik pun dapat dimainkan oleh Kota Tasikmalaya mengingat kota tersebut berkedudukan sebagai pusat konsentrasi kekuatan pemaksa yang tercermin dalam sistem pertahanan yang terwujud dalam bentuk kekuatan militer dan sistem perlindungan bagi golongan elite kota. Di *Afdeeling* Tasikmalaya, kekuatan militer Hindia Belanda (sebagai kekuatan pemaksa) dikonsentrasikan di Kota Tasikmalaya. Tidak hanya itu, kekuatan-kekuatan pendukung pun, antara lain poliklinik militer, dibangun juga di kota ini.

Memasuki abad ke-20, ketiga fungsi kota tersebut semakin berjalan efektif seiring dengan perubahan status Kota Tasikmalaya. Berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal Willem Rooseboom Nomor 4 Tanggal 1 September 1901, sejak tanggal 1 Desember 1901 *Afdeeling* Tasikmalaya dihapus. Distrik Tasikmalaya, Singaparna, Ciawi, dan Indihiang dimasukkan ke wilayah *Afdeeling*/Kabupaten Sukapura (*Staatsblad van NI*, 1901. No. 327). Selain itu, pemerintah kolonial pun menetapkan Kota Tasikmalaya sebagai ibu kota Kabupaten Sukapura

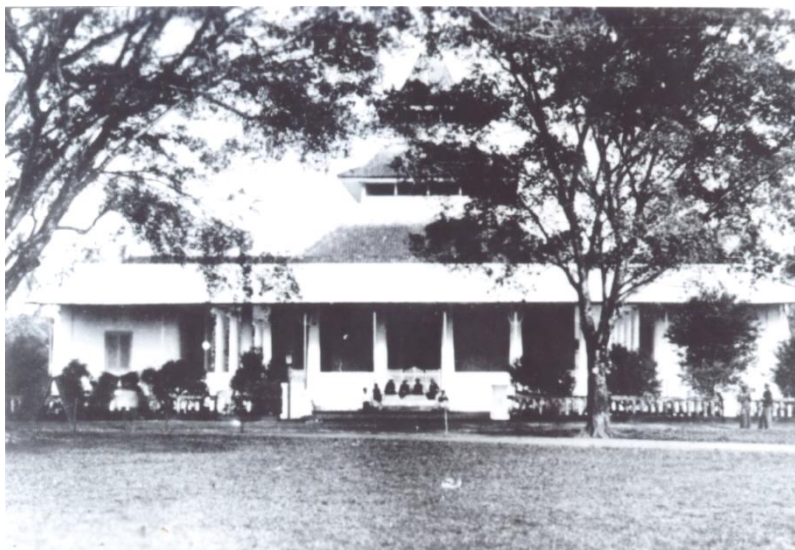
menggantikan Manonjaya berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom. Oleh karena prasarana yang diperlukan bupati belum tersedia (antara lain pendopo), pemerintah kolonial masih memperkenankan R. T. Prawira Hadiningrat (Bupati Sukapura) tetap tinggal di Manonjaya (*Staatsblad van NI*, 1901. No. 431). Sebagai simbol perpindahan, pada 1 Oktober 1901, Bupati R. T. Prawira Hadiningrat meletakkan batu pertama untuk pembangunan pendopo yang terletak sekitar 300 meter ke arah timur Masjid Agung Tasikmalaya (Latief, 2009: 1).

**Foto 3: Pendopo Kabupaten di Kota Tasikmalaya Tahun 1923**



Sumber: *Rumah (Pendopo) Bupati di Tasikmalaya*. Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0186/028. Jakarta: Arsip Nasional RI.

**Foto 4: Masjid Agung Tasikmalaya Tahun 1923**



Sumber: Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0802/041. Jakarta: Arsip Nasional RI.

Pada 1921, Distrik Tasikmalaya memiliki luas sekitar 178 km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi tiga *onderdistrik*, yaitu Tasikmalaya, Kawalu, dan Indihiang; serta dengan jumlah desa sekitar 46 buah (Stibbe, 1921: 285; *RA voor NI*, 1919: 394). Sejak tahun 1926 fungsi ideologis Kota Tasikmalaya pun menguat seiring dengan ditetapkannya sebagai ibu kota *Afdeeling* Priangan Timur (*Oost-Priangan*). Dalam kurun ini, kepala pemerintahan *afdeeling* dipegang oleh residen karena kekuasaannya meliputi lebih dari satu kabupaten. *Afdeeling* Priangan Timur itu sendiri meliputi Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis<sup>8</sup> (Lubis, 1998: 35). Pada tahun 1931,<sup>9</sup> Pemerintah Hindia Belanda menghapus *Afdeeling* Priangan Timur dan ketiga wilayah kabupatennya bersama-sama dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang disatukan di bawah nama *Afdeeling* Priangan (Suharto, 2002: 68).<sup>10</sup>

## G. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama**, Tasikmalaya telah dipergunakan sebagai nama suatu wilayah pemerintahan antara tahun 1816-1820. Sebelum kurun waktu itu, nama yang dikenal adalah Tawang, Galunggung, atau Tawang-Galunggung. Ketika Gunung Galunggung meletus tanggal 8 dan 12 Oktober 1822, nama Tasikmalaya sudah dipergunakan dalam administrasi wilayah pemerintahan.

**Kedua**, penggunaan nama Tasikmalaya sebagai nama distrik bukan merupakan perubahan dari Distrik Tawang karena dari berbagai sumber arsip distrik tersebut tidak pernah tercatat. Pada masa Raffles (1816) di wilayah Priangan terdapat sebuah distrik bernama Cicariang. Oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda, nama tersebut diubah menjadi *Distrikt Tassikmalaija op Tjitjariang*. Pada akhir tahun 1930-an, nama distrik tersebut berubah lagi menjadi *Distrikt Tassikmalaija*. Setelah berubah, Cicariang menjadi sebuah onderdistrik dengan nama Cibeuti dengan pusat pemerintahannya di Cibeuti.

**Ketiga**, pertumbuhan Kota Tasikmalaya bukan sebagai bagian dari perkembangan Kabupaten Sukapura, melainkan sebagai bagian dari dinamika Kabupaten Sumedang. Baru pada tahun 1901, Kota Tasikmalaya merupakan bagian integral dari Kabupaten Sukapura yang kemudian namanya berubah menjadi kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, pertumbuhan Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari fungsi kota yang semula berkedudukan sebagai kota distrik yang kemudian berkedudukan sebagai kota kabupaten dan keresidenan.

## DAFTAR SUMBER

### Arsip dan Sumber Resmi Tercetak

- Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste en Beste Berigten.* 1861. Eerste Deel (A-J). Amsterdam: van Kamp.
- Algemeen Instructie van Alle Inlandsche Hoofden en Beambten behalve de Gestelijkeheid in de Residentie Preanger Regentschappen met vermelding van derzelver inkomsten in 1839.* Koleksi Arsip *Preanger-Regentschappen*. No. 29<sup>a</sup>/23. Jakarta: ANRI.
- Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 17 Maret 1891 No. 8.* Jakarta: ANRI.
- Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1871-1939.* Batavia: Landsdrukkerij.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1859.* No. 91; 1870. No. 121; 1901. No. 327 dan 431; 1913. No. 356; 1925. No. 391.
- Statistiek van Java.* 1820, Koleksi Arsip *Preanger-Regentschappen*. No. 28/9. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Statistiek der Preanger Regentschappen. 1863.* Koleksi Arsip *Preanger-Regentschappen*, No. 30/5. Jakarta: Arsip Nasional RI.

### Leksikografi, Foto, dan Peta

- van Carbee, P. Baron Melvill en W. F. Versteeg. 1853-1862. *Algemeene Atlas van Nederlandsch Indie.* Batavia: van Haren Noman & Kolff.
- District Tassikmalaja.* Koleksi Arsip *Inventory of Cartographic Manuscript of the 17<sup>th</sup> to the 19<sup>th</sup> Century.* No. A.51. Jakarta: ANRI.
- Masjid Agung Tasikmalaya.* Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0802/041. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Rumah (Pendopo) Bupati di Tasikmalaya.* Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0186/028. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Stibbe, D. G. 1921. "Tasikmalaja" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.* Tweede Druk. Veerde Deel (Soemb – Z). Hlm. 284-285. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Tasikmalaja.* Koleksi Arsip Kartografi Indonesia 1913-1946. No. 744/Blad 49 n/24. Jakarta: ANRI.
- Veth, P. J. 1869. "Tassik Malaja (zie Tassikmalajoe)" dalam *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste en Beste Berigten.* Hlm. 906. Deerde Deel (R-Z). Amsterdam: van Kamp.

### Disertasi, Tesis, Jurnal Ilmiah, Laporan Penelitian, dan Skripsi

- Anonim. 1920. *Rupa-rupa Salinan Gunung Galunggung.* No. 1-27. Bandung: Direktorat Vulkanologi. Ditjen Pertambangan Umum.
- Brandes, J. 1888. "Drie Koperen Platen uit den Mataramschen Tijd". *TBG*, XXXII.
- Bronto, S. 1983. "Geologi G. Galunggung" dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Tahunan X Ikatan Ahli Geologi Indonesia.* Jakarta: Ikatan Ahli Geologi Indonesia.
- Danasasmita, Saleh. 1975. *Hubungan antara Sri Jayabhupati dengan Prasasti Gegerhanjuang.* Bandung: Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran.
- Ekadjati Edi S. *et al.* 1975. *Hari Jadi Tasikmalaya.* Cetakan Pertama. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.

- Falah, Miftahul. 1991. Pengungsian Pemerintah Propinsi Jawa Barat dari Bandung ke Tasikmalaya pada masa Perang Kemerdekaan (1946-1948). Skripsi. Jatinangor: Fakultas Sastra Unpad.
- Fitri, Indri Alinda. 1995. *Reorganisasi Priangan 1 Juni 1871 dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Rakyat Priangan (1871-1917)*. Skripsi. Jatinangor: Fakultas Sastra Unpad.
- Furuya, Takahiko. "Preliminary Report on Some Volcanic Disasters in Indonesia" dalam *South East Asian Studies*. 1978. Vol. 15. No. 4.
- Muhsin Z., Mumuh. 1994. *Kota Bogor; Studi tentang Perkembangan Ekologi Kota (Abad ke-19 sampai Abad ke-20)*. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Natanagara, Rd. Asik. "Sadjarah Soemedang ti Djaman Koempeni Toeg Nepi ka Kiwari" dalam *Volksalmanak Soenda*. 1938. Batavia Centrum: Bale Poestaka.
- Permadi, Agus. "Prasasti Geger Hanjuang; Ngahanjuang-siangkeun Hari Jadi Tasikmalaya" dalam *Mangle* No. 495, September 1975.
- Zen, M. T. "Seribu Gunung di Priangan Timur" dalam *Majalah Intisari*. No. 6. Agustus 1968.

## Buku

- Adeng. 2005. "Sejarah Sosial di Kabupaten Tasikmalaya" dalam Sindu Galba (ed.). *Sejarah Sosial di Jawa Barat dan Banten*. Bandung: BKSNT. Hlm. 69-138.
- van der Chjis, J. A. 1880. *Babad Tanah Pasundan*. Terj. Raden Karta Winata. Batavia: Kantor Cetak Gubernemen.
- Dienaputra, Reiza D. 2004. *Cianjur: Antara Bandung dan Buitenzorg. Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942*. Bandung: Prolitera.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- de Graaf, H. J. 1990. *Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung*. Terj. Pustaka Grafiti Utama dan KITLV. Jakarta: Pustaka Grafiti Utama.
- de Haan, F. 1912. *Priangan; de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Deerde Deel. Batavia: G. Kolff & Co.
- Indonesia. Kementrian Penerangan. 1953. *Propinsi Djawa Barat*. Djakarta: Dewaruci Press.
- . 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- de Klein, Jacob Wouter. 1931. *Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn Nawerking*. Delf: de NV Technische Boekhandel en J. Waltman Jr.
- Lubis, Nina H. 1998. *Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1042)*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Lubis, Nina H. *et al.* 2003. *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid I. Bandung: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lemlit Unpad.
- Marlina, Ietje. 2000. "Sukapura (Tasikmalaya)" dalam *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Hlm. 91-110. Jatinangor: AlqaPrint.
- . 2007. *Perubahan Sosial di Tasikmalaya; Suatu Kajian Sosiologis Sejarah*. Bandung: AlqaPrint.
- Musch, C. C. 1918. *Topographisen Dienst in Nederlandsch Indie over 1917. Dertiende Jaargang*. Batavia.
- Pemerintah Kotip Tasikmalaya. 1977. *Gambaran Perkembangan Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Tasikmalaya selama 1 Tahun*. Tasikmalaya: Kotip Tasikmalaya.
- Roswandi, Iwan. 2006. "Sejarah Kabupaten Tasikmalaya: Studi tentang Berdiri dan Berkembangnya Pemerintahan Tasikmalaya" dalam Iim Imanuddin dan Sindu Galba (eds.).

*Sejarah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten; Garut, Subang, Bekasi, Tasikmalaya, dan Tangerang.* Bandung: BKSNT.

- Sastrahadiprawira, R. Memed. 1953. "Manondjaja Dajeuh Narikolot" dalam R. I. Adiwidjaja. *Pantjawarna*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Sjafrudin, Ateng *et al.* 1993. *Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Barat.
- Suharto. 2002. *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942; Profil Pergerakan Etno-Nasionalis*. Bandung: Lembaga Kajian Strategis Paguyuban Pasundan.
- Widjajakusumah, R. D. Asikin. 1961. *Tina Babad Pasundan; Riwayat Kemerdekaan Bangsa Sunda Saruntangan Kerajaan Padjadjaran dina tahun 1580*. Bandung: Kalawarta Kudjang.

## Internet

- Latief, Abdoel. 2009. *Pendopo Tasikmalaya; Bukti Sejarah Berdirinya Tasikmalaya*. Diakses dari <http://berita.prianganonline.com/?act=berita&aksi=lihat&id=1684>, Tanggal 15 Agustus 2009, Pukul 11.00 WIB.
- Koleksi KITLV. Diakses dari [http://www.geheugenvannederland.nl/?en/items/KITLV01:866/&p=1&i=14&st=Tasik\\_malaja&sc=\(Tasikmalaja%20\\*\)/](http://www.geheugenvannederland.nl/?en/items/KITLV01:866/&p=1&i=14&st=Tasik_malaja&sc=(Tasikmalaja%20*)/), 28 September 2009, Pukul 1957 WIB.
- [http://www.geheugenvannederland.nl/?en/items/KITLV01:122/&p=1&i=2&st=Tasikmalaja&sc=\(Tasikmalaja\)/&wst=Tasikmalaja](http://www.geheugenvannederland.nl/?en/items/KITLV01:122/&p=1&i=2&st=Tasikmalaja&sc=(Tasikmalaja)/&wst=Tasikmalaja). Diakses Tanggal 12 Mei 2008, Pukul 14.00 WIB.

---

## Catatan

- Artikel ini merupakan hasil dari penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul *Perubahan Sosial di Kota Tasikmalaya, 1820-1942*.
  - Asisten Ahli pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran.
- <sup>1</sup> Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 1999: 5-6).
- <sup>2</sup> Ada yang menafsirkan bahwa tanggal 9 Muharam Tahun Alip itu identik dengan tanggal **20 April 1641** (de Haan, 1912: 59). Penafsiran de Haan tersebut diperkuat oleh de Graaf (1990: 276) yang mengatakan bahwa penguasa Mataram tersebut baru dipanggil dengan gelar "sultan" pada tahun 1641, seperti tertulis dalam *Daghregister* 1 Juli 1641. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa penanggalan tersebut identik dengan tanggal **16 Juli 1633** (Brandes, 1888: 353-356; Widjajakusumah, 1961: 27). Apabila dihubungkan dengan perlawanan Dipati Ukur yang menurut versi Batavia berakhir tahun 1632, tahun alip itu lebih rasional kalau jatuh pada 16 Juli 1633 karena Sultan Agung mereorganisasi Priangan terkait dengan peristiwa itu (Hardjasaputra, 20 Februari 2007). Meskipun dibentuk bersama-sama dengan Kabupaten Bandung, namun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak mengambil salah satu di antara dua tanggal di atas sebagai hari jadinya, melainkan tanggal 21 Agustus 1111 (Permadi, 1975). Tanggal tersebut merupakan penafsiran tanggal 13 Badrapada tahun 1033 Saka yang tertulis pada Prasasti Geger Hanjuang ' (Danasasmita, 1975: 28).
- <sup>3</sup> Berdasarkan laporan Pangeran Sumedang kepada R. van der Capellen (Residen Priangan) diperoleh informasi bahwa letusan Gunung Galunggung tahun 1822 mengakibatkan sekitar 114 kampung mengalami kerusakan parah, sekitar 4.011 orang meninggal dunia, mematikan sekitar 105 ekor kuda serta 853 ekor kerbau dan sapi, serta menghancurkan sekitar 775.795 pohon kopi (*Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste en Beste Berigten*. 1861: 330; *Bataviasch Courant*, 22 Februari 1823. No. 8 dalam Anonim, 1920). Kalau dilihat dari angka-angka tersebut, dapat dibayangkan bahwa letusan Gunung Galunggung tahun 1822 tersebut dapat dikategorikan sebagai letusan yang dahsyat meskipun tidak se-dahsyat letusan Gunung Tambora (1815) atau Gunung Krakatau tahun (1883).
- <sup>4</sup> *Pal* merupakan ukuran panjang yang digunakan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Satu *pal* (Jawa) sama dengan 400 *roede* atau jika dikonversikan ke dalam sistem matrik, satu *pal* ekuivalen dengan 1.506,943 meter (*Regeeringsalmanak voor NI*, 1925: 760). Dengan mengacu pada ukuran tersebut, Kota Tasikmalaya berarti terletak sekitar 10,55 kilometer dari Kota Manonjaya atau sekitar 82,88 kilometer dari Kota Sumedang.

- 
- <sup>5</sup> *Geographische Mijlen* merupakan ukuran panjang yang dipergunakan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang ekuivalen dengan 7.407, 4 meter. *Pal* merupakan ukuran panjang yang dipergunakan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Satu *pal* (Jawa) sama dengan 400 *roede* atau jika dikonversikan ke dalam sistem metrik, satu *pal* ekuivalen dengan 1.506,943 meter (*Regeeringsalmanak voor NI*, 1925: 760).
- <sup>6</sup> Dengan mengacu pada ukuran tersebut, Kota Tasikmalaya berarti terletak sekitar 10,55 kilometer dari Kota Manonjaya atau sekitar 82,88 kilometer dari Kota Sumedang.
- <sup>7</sup> Setelah melalui perdebatan, tanggal 10 September 1870, *Eerste Kamer* Kerajaan Belanda bersama-sama dengan van Boose (Menteri Urusan Kolonial) mengeluarkan ordonansi sebagai landasan hukum bagi gubernur jenderal melakukan reorganisasi Priangan. Ordonansi itu terdiri atas enam pasal, yakni (1) Pemerintah Hindia Belanda akan mencabut hak bupati untuk memungut pajak, baik dalam bentuk uang, barang, maupun kerja. Sebagai gantinya, bupati akan mendapat gaji tiap bulannya dari Pemerintah Hindia Belanda; (2) Kekuasaan ulama terhadap urusan dunia akan dibatasi; (3) Para pegawai di bawah bupati akan mendapat gaji dari Pemerintah Hindia Belanda; (4) Pemerintah Hindia Belanda akan memungut pajak dari rakyat; (5) Pemerintah Hindia Belanda akan memperbanyak wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh asisten residen; dan (6) Menaikan pajak kopi dari 10 gulden menjadi 13 gulden (Meerten dalam Fitri, 1995: 45).
- <sup>8</sup> Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis sebelumnya bernama Kabupaten Limbangan, Sukapurana, dan Galuh. Tahun 1913, Pemerintah Hindia Belanda mengubah nama ketiga kabupaten tersebut (*Staatsblad van NI*, 1913. No. 356). Kabupaten Ciamis, menjadi bagian dari wilayah Keresidenan Priangan sejak tahun 1915 karena sebelumnya sebagai bagian dari wilayah Keresidean Cirebon (Falah, 1991: 38).
- <sup>9</sup> Meskipun hanya berlangsung selama lima tahun, namun sebanyak empat orang residen pernah memerintah *Afdeeling* Priangan Timur di Kota Tasikmalaya, yaitu H. C. van den Bos (1925-1926), G. D. P. A Renardel de Lavalette (1926-1927), J. B. Hartelust (1927-1929), dan F. A. C. Halkema (1929-1931) (Dienaputra, 2004: 189; Kleine, 1931: 134; *RA voor NI*, 1926-1932).
- <sup>10</sup> Sistem *afdeeling* ini digunakan dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1937 karena sejak tahun 1938 secara resmi Pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah *residentie* (Suharto, 2002: 68).